

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Penelitian terdahulu penting dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dan referensi dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu, guna untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan agar pencapaian tujuan penelitian dapat berjalan dengan optimal. Penelitian terdahulu dalam penelitian yang dilakukan ini ini dilakukan dengan menelusuri hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian.

Matriks Penelitian Terdahulu:

Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2017	Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode yaitu, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Perbedaannya ada pada fokus penelitian, dimana pada penelitian tersebut terjadi persaingan antara kedua desa dalam memperebutkan tanah disekitar petuanan <i>Ukur</i> hingga <i>Leyat</i> . Setelah persaingan terjadi munculah konflik <i>laten</i> dari kedua desa. Sedangkan fokus penelitian ini membahas mengenai konflik antara pemerintahan desa dengan

			masyarakat desa terkait tanah gogol.
Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara	2020	Pada jurnal ini masyarakat sama sama memperjuangkan hak tanah milik.	Mengenai jurnal ini menggunakan pendekatan metode penelitian normatif. Yaitu menggunakan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Konflik agraria tanah ulayat sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia terutama mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam dengan asumsi sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.

Ada 2 penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, berjudul ***“Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat”*** yang dilakukan *oleh Adrana Batlajery, August E. Pattiselanno, Leunard O. Kakisina.* Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik agraria di desa Watmuri

adalah faktor ekonomi dan sosial. Konflik itu disebabkan dan akibat-akibatnya adalah sebagai berikut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana data yang di kumpulkan melalui metode wawancara dan juga observasi, kesamaannya adalah pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, pada data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi.

Di Desa Watmuri, perampasan tanah atau sengketa tanah atau pertanian dengan pola klaim tanah atau hak atas tanah didistribusikan secara tidak adil dan merata, secara efektif dipengaruhi oleh aspek pemanfaatan tanah oleh petani.

Ketimpangan tata guna lahan meningkatkan jumlah penduduk miskin akibat faktor ekonomi dan ketimpangan sosial, yaitu kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat, menimbulkan perbedaan yang signifikan dan menimbulkan konflik. Terbukti dari konflik antara desa Arma dan Desa Watmuri, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Watmuri terhadap masyarakat Arma memungkinkan adanya perbedaan antar desa. Adanya klaim masyarakat Arma atas tanah milik masyarakat Watmuri juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.¹²

Selanjutnya pada jurnal *kedua* oleh **Zulkifli Taib** yang berjudul **“Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau**

¹²Adrana Batlajery, August E Pattiselanno, Leonard O Kakisina(2017), *Konflik Agraria Di Desa Watumuri Kecamatan Nirumas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2017*. dirujuk pada 30 Juli, pukul 21.47.

Morotai Provinsi Maluku Utara”, di kawasan perbatasan bagian Timur Indonesia yaitu Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berbagai macam pendekatan untuk mencari solusi penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, akan tetapi gejolak dari konflik selalu saja terjadi.

Otoritas pengatur tertinggi berada di pemerintah, yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan pemerintah yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan investasi. Lahan tersebut telah ditempati secara turun-temurun.

Masyarakat kemudian kecewa karena dalam kurun waktu tiga tahun tidak ada penjelasan yang jelas tentang batas-batas *pansus*. Masyarakat juga meminta pemerintah menyelesaikan sengketa tanah dan mendata tanah sengketa milik warga.

Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 2013 karena desakan masyarakat untuk menyelesaikan wilayah yang disengketakan, pemerintah Pulau Morotai mempertemukan TNI-AU dengan masyarakat setempat, namun kedua tim mempertahankan hak dan pendapat mereka kemudian memutuskan untuk membentuk pemerintahan Pulau Morotai. Tim khusus tapal perbatasan khusus untuk meneliti dan mencari data hak atas tanah yang disengketakan antara masyarakat dengan TNI-AU untuk mencari solusinya.¹³

¹³Data dari Badan Pertanahan Nasional (diakses pada 31juli,pukul 07.22).

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Konflik Sosial

Konflik merupakan sebuah hubungan antara dua belah pihak atau lebih baik individu atau kelompok yang memiliki saran atau pendapat yang tidak sejalan. Konflik bisa terjadi karena adanya ketidak selarasan masyarakat dalam berpendapat. Sudah tertulis dalam kamus bahasa Indonesia yang telah disusun oleh Poerwadanto bahwa konflik didefinisikan suatu pertentangan atau perpecahan. Pertentangan atau perpecahan ini muncul dalam bentuk ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang saling bersangkutan.¹⁴

Dari pandangan segi ilmu politik, konflik seringkali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, teroris, dan revolusi. Konflik dapat berarti perbedaan pendapat antara individu dan individu, kelompok dan individu, atau kelompok dan pemerintah.¹⁵

Karl Max adalah arus utama dalam tradisi konflik dibandingkan dengan teori-teori lain dan ini dijelaskan dalam bukunya *Traditions of Thought in Sociology*. Karl Max adalah arus utama dalam tradisi konflik dibandingkan dengan teori-teori lain dan ini dijelaskan dalam bukunya *Traditions of Thought in Sociology*.¹⁶

¹⁴Muryati, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman, "Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan". Hlm 7.

¹⁵Muryati, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman, "Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan". Hlm 8.

¹⁶Ibid.

Dari sudut pandang Marsono, teori konflik menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda dan juga mengarah pada perubahan sosial. Misalnya, ia membuat lembaga dan organisasi untuk bekerja sama dalam sengketa pertanian di Nusantara. Kemudian Dahrendorf menyatakan bahwasannya konflik antara kelompok-kelompok terkordinasi yang mewakili peran-peran organisasi yang dikarakterisasi oleh hubungan kekuasaan dan bukan analisis pejuang kelas.

Menurutnya konflik hanya muncul dalam relasi-relasi pejuang kelas. Dahrendorf kemudian juga memahami relasi dalam struktur-struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan.¹⁷ Banyak konflik dalam kehidupan masyarakat, dan jika tidak ditangani dengan cepat dan serius, hal-hal kecil pun bisa berubah menjadi konflik dan kerusuhan besar.

Tetapi jika kelas bawah bisa membentuk kelompok dan menyelesaikan masalah dengan tenang, maka konflik bisa menyatukan kehidupan masyarakat. Dan tak banyak konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan yang kemudian merusak kehidupan masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tidak berjalan dengan sangat baik.

Teori konflik Dahrendorf adalah teori perjuangan kelas Marx. Dahrendorf tidak hanya mendukung perjuangan kelas Marx, tetapi juga mengkritik fakta bahwa pembentukan kelas sosial tidak didasarkan pada

¹⁷Muryati, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman, "Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan", Hlm 24.

kepemilikan alat-alat produksi. Membentuk kelas sosial baru, distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam struktur ini menyebabkan konflik sosial.

Tesis Dahrendorf adalah bahwa posisi yang berbeda dalam masyarakat memiliki derajat kekuasaan atau status yang berbeda. Kekuatan bukan pada orang, tetapi pada posisi. Menurut Dahrendorf, kekuasaan bukan hanya seseorang, tetapi juga kedudukan, karena kekuasaan itu tidak permanen.

Selain itu, Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari banyak unit serikat pekerja. Konflik yang muncul dalam asosiasi terkait dengan keinginan kelas penguasa untuk mempertahankan *status quo*, dan keinginan mereka yang berada di bawah atau posisi yang dikendalikan untuk melakukan perubahan.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman berpendapat bahwa konflik kepentingan tersebut muncul secara sengaja (*kepentingan laten*) sebelum seorang individu mempengaruhi atasan dan bawahannya untuk berperilaku seperti yang diharapkan kelompok. Kemudian mereka menambahkan bahwa orang tidak perlu tahu (*Kepentingan Manifes*) untuk bertindak atas kepentingan tersebut.¹⁸

Menurut teori konflik Max Weber, konflik merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Tentu saja kontradiksi ada dalam masyarakat dan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Max Weber juga berpendapat bahwa masalah kehidupan modern dapat dikaitkan dengan sumber material yang nyata (*misalnya, struktur kapitalisme*). Bagi Max Weber, konflik

¹⁸James Leo Pasule 2019, Konflik dan Resolusi Konflik. Hlm. 34.

adalah sistem kekuasaan atau sistem kekuasaan, dan kekuasaan cenderung bergantung pada kekuasaan.

Munculnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf¹⁹, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi berbentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi dalam hal mana para populasi mempunyai kekuasaan memerintah dalam aspek-aspek tertentu dan menguasai kedudukan tertentu, terdapat kedudukan lain yang dimana para penghuni menjadi bawahan pemerintah. Dari perbedaan ini sangat berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan.

2.2.2 Teori Elite Politik

Secara umum elite mengacu pada sekelompok orang sukses, mereka yang mampu menduduki status sosial tinggi. Dalam sebuah pengertian khusus elite dapat diartikan sebagai kelompok tertentu orang-orang yang tekemuka di golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Pareto mempunyai sebutan lain dalam teorinya, ia membedakannya menjadi 2, dimana mereka yang lebih unggul dalam aspek kecerdikan dan kelicikan politik disebut sebagai "*para rubah*" dan mereka yang mempunyai keberanian dan juga jiwa kepemimpinan yang tinggi disebut sebagai "*para singa*". Dalam sepanjang

¹⁹ Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry "Teori Konflik Sosial" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 204). Hlm : 151.

sejarah negara, salah satu di antara elite ini ia mengkombinasikan diantara keduanya dan juga memerintah, tergantung sesuai kebutuhan zaman

Dalam peredaran elite, konflik bisa saja muncul dari kelompok itu sendiri maupun didalam antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Dari pengertian sosiologis dan politis, elite merupakan *the ruling class*, yaitu suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial.

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik lokal. Dalam rotasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Rotasi elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori²⁰, antara lain:

- a. Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri.
- b. Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya.

Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu:

- a. Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau
- b. Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

²⁰ S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, Hlm 203.

Keberagaman pendapat ahli mengenai elite membuat Suzanna Keller mengelompokkan elite dalam dua aliran²¹, antara lain :

1. Golongan elite adalah golongan tunggal yang biasa disebut elite politik. Ahli yang termasuk menjelaskan golongan elite pada kategori ini adalah Aristoteles, Gaetano Mosca, dan Pareto.
2. Golongan kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. Para ahli yang mengkaji golongan elite ini adalah Saint Simon, Karl Mennheim, dan Raymond Aron.

Pareto menjelaskan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik ialah yang disebut sebagai elite karena mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.²² Pareto menjelaskan lebih lanjut bahwa elite terdiri dari dua kelas.

1. *Pertama*, lapisan atas, yaitu elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*).
2. *Kedua*, ialah lapisan elite yang rendah (*non-elite*).²³

Kemudian, mengacu pada definisi elite politik menurut Mosca mempercayai bahwa yang membedakan karakteristik elite ialah kemampuan untuk

²¹Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995). Hlm 5.

²²Pareto sebagaimana dikutip oleh Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Hlm 166.

²³*Ibid*, Hlm 167.

memimpin sekaligus menjalankan kontrol politik, yang mana sekali kelas memerintah tersebut hilang kepercayaan secara otomatis orang-orang diluar kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinannya kelas yang berkuasa ini akan dijatuhkan sekaligus digantikan oleh penguasa baru.²⁴

Pareto dan juga Mosca menyebutkan bahwasannya di dalam masyarakat terbentuk kelas yang terbagi yaitu kelas memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang fungsi politik, memonopoli kekuasaan, mampu mencapai sebuah keinginan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan juga dimana kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar juga diatur dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Dari apa yang di paparkan oleh Pareto dan juga Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite, karena seyogyanya juga elite tidak memperhatikan bidang intraksi lain dalam masyarakat. Dari hal itu dikarenakan dalam eranya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu strong atas rakyat.

²⁴ Universitas Sumatera Utara, tersedia pada :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46MTUj83vAhUTjeYKHd6bC_YQFjACegQIFRAD&url=http%3A%2F%2Frepositori.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F50611%2F4%2FChapter%2520II.pdf&usg=AOvVaw2y-4hrIkYxQuvN08VRdKKGX

2.3 Kerangka Pemikiran

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, politik agraria adalah kebijakan yang diambil oleh negara untuk melestarikan, memelihara, berbagi, mengembangkan, menggunakan, mengelola dan mendistribusikan tanah dan sumber daya alam lainnya yang kondusif untuk kesejahteraan rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dimasukkan dalam sebuah Undang-Undang Agraria yang memuat pada asas-asas, dasar-dasar, dan juga pada soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, adanya hubungan yang erat antara politik dan hukum.²⁵

Urip Santoso berpendapat bahwa politik agraria merupakan garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, maupun mengurus serta membagi tanah dan sumber alam yang lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan maupun kesejahteraan rakyat maupun Negara, hal tersebut bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis ini mengambil dari dalam ilmu sosial. Sebagaimana yang dikatakan Kartodirdjo, bahwasannya fungsi ilmu sosial dalam ilmu sejarah adalah untuk menjawab pertanyaan '*mengapa*' serta membantu dalam menganalisis unsur dan faktor penyebab yang melatar

²⁵Soedikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988), Hlm 106.

belakangi gejala sejarah. Atas dasar, studi ini memilih menggunakan kerangka teori sosiologi strukturalisme, yaitu teori Materialisme Dialektika Historis dari Karl Marx dan teori Konflik dari Ralf Dahrendorf.

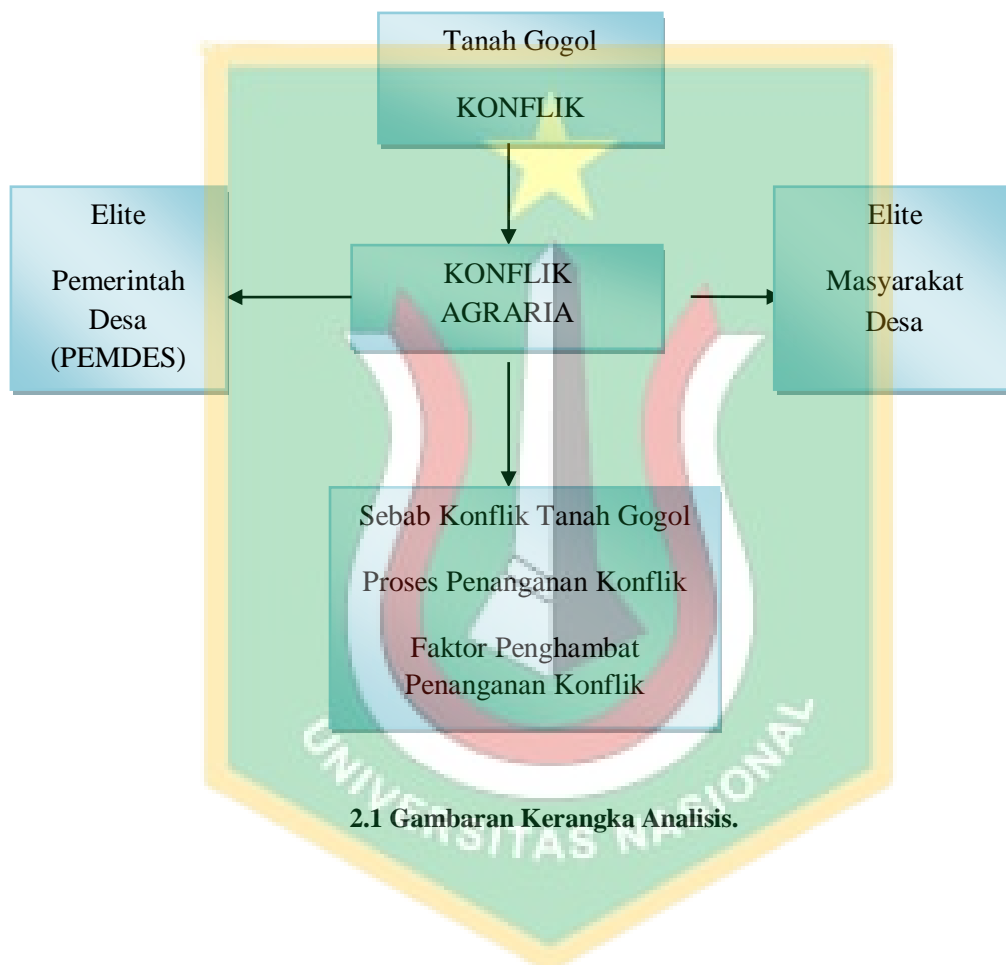
Di dalam analisis, Teori Konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menopang Teori Materialisme Dialektika Historis Karl Marx. Yang dimana artinya, semua teori akan dipakai dalam menganalisis permasalahan, akan tetapi teori Materialisme Dialektika Historis dari Karl Marx memiliki kedudukan yang utama.

Marx mengelompokkan materialisme ke dalam materialisme dialektika dan kemudian materialisme historis. Materialisme merupakan sebuah dialektika, yang dimana ajaran Marx yang terkait dalam perihwal alam semesta secara umum. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Marx, dari perkembangan sejarah manusia sudah tunduk pada watak materialistik dialektika. Sedangkan materialisme historis merupakan sebuah pandangan ekonomi terhadap sejarah.

Kemudian kata historis ditempatkan oleh Marx dengan bermaksud untuk menjelaskan dari berbagai aspek tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi pada sepanjang zaman. Marx tetap konsekuen memakai kata *historical* materialisme untuk menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan filsafat idealisme.

Dahrendorf menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pertentangan tersebut terjadi karena dua golongan saling bertentangan, yaitu golongan yang berkuasa dan golongan

yang dikuasai. Pertentangan tersebut terjadi karena golongan kuasa memertahankan status *quo*, sedangkan yang dikuasai berusaha melakukan perubahan-perubahan. Pertentangan ini selalu ada setiap waktu dan setiap struktur.²⁶



2.1 Gambaran Kerangka Analisis.

²⁶Jurnal: Dani Umaruddin, “Konflik Agraria Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 1979–2019”.

Seperti apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang, hubungan dialektis antara manusia dengan sumber-sumber agrarian dapat diperbincangkan dari beragam pandangm sudut. Dalam pengkajian permasalahan penelitian Konflik Agraria antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Gebyog, penulis menghubungkan mengenai bagaimana golongan yang berkuasa dengan yang di kuasai, elit pemerintahan desa sebagai golongan yang berkuasa, dan masyarakat desa sebagai golongan yang di kuasai.

Seperti kerangka berpikir di atas, lebih jelasnya berisi mengenai adanya golongan yang berkuasa dan golongan yang dikuasai. Kemudian, golongan yang berkuasa inilah elite pemerintahan desa. Sedangkan golongan yang dikuasai ialah masyarakat desa. Sehingga, hal tersebut menimbulkan konflik antar golongan, yang dimana dalam proses penyelesaiannya menjumapai berbagai faktor sebab, menegtahui bagaimana proses penangan konflik, dan juga mengetahui faktor penghambat penangan konflik

Konflik mengidentifikasi berbagai peranan begitu juga kekuasaan dalam masyarakat, pertentangan antar kedua golongan tersebut terjadi karena dimana dari pihak yang berkuasa mempertahankan status *quonya*, sedangkan golongan yang di kuasai ingin melakukan perubahan yang baru. Di Indonesia sendiri banyak sekali konflik-konflik mengenai perampasan tanah yang di lakakukan oleh berbgai elit-elit yang dimana mereka mempunyai kekuasaan yang tinggi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teori sebagai pemecah permasalahan yang di bahas yaitu adanya konflik agrarian yang terjadi antara Pemerintahan

Desa dengan Masyarakat Desa Gebyog Terkait Penggunaan Tanah Gogol, dimana teori yang di pakai adalah Teori Konflik Sosial dan Teori Elit Politik.

